

**MODAL SOSIAL MASYARAKAT PEDULI BENCANA (MPB)
DESA TANJUNG LEBAN DALAM PENCEGAHAN KEBAKARAN
LAHAN GAMBUT**

Oleh: Erlangga Noor

Email: erlangga.noor3095@student.unri.ac.id

Pembimbing : Prof. Dr. Ashaluddin Jalil,MS

Jurusan Sosiologi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-6327

ABSTRACT

This study aims to identify and analyze the activities, challenges, social capital and social cohesion of the Community Concerned about Disasters in the village of Tanjung Leban Bengkalis with a qualitative approach. The results of the study show that bonding social capital in MPB activities is in the form of mutual cooperation traditions, activities for making water canals and canal blockings around the residents' gardens. Bridging social capital can be seen from joint activities to revegetate burnt forests with timber plants and plants with economic value such as areca nut and fruits. Linking social capital can be seen from the good relations with institutions inside and outside the village such as the village government. PT. BBHA, Manggala Agni, NGOs, universities, and other institutions that have one goal. Elements of internal and external trust in the group's duties and functions are going well. Likewise with social networks, it can be seen that MPB participates in building networks well, especially at the external level in their work area. The internal norms of the MPB group are strongly intertwined on the basis of personal awareness. A set of rules is established by the MPB for its members, these rules are adhered to even if they are sometimes only verbal. Meanwhile, if there are members who violate the sanctions given are based on deliberative considerations between MPB group members. Social cohesion is created on the basis of a sense of mutual ownership and a common goal of concern in protecting forests and peatlands. Strong social cohesion had a positive impact on MPB institutional performance in reducing the number of forest and peatland fires in Tanjung Leban Village.

Keywords: Peatland, Social Capital, Tanjung Leban

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi cukup *intens* selama 7 (tujuh) tahun terakhir di beberapa wilayah Indonesia telah menjadi isu serius baik nasional maupun internasional. Hal ini terjadi karena dampak yang ditimbulkan sangat kompleks di bidang kesehatan, lingkungan, sosial, ekonomi, maupun pendidikan. Berkaca dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi tahun 2015, sekitar 10,5 juta hektar hutan rusak, lebih dari 60.000 jiwa terinfeksi saluran pernafasan atas (ISPA), dan kerugian ekonomi mencapai Rp. 220 triliun (Baskoro et al., 2015). *The crisis of haze in Riau Province Indonesia, due to the annual forest and land fires, has caused several problems in some countries across South East Asia including environmental law violation, air pollution, and health problems.* (Sidiq et al., 2019). Kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia menyebabkan polusi udara yang terjadi di beberapa negara tetanggabahkan yang mengakibatkan gangguan saluran pernapasan (ISPA).

Bencana kebakaran hutan dan lahan terjadi sebagian besar pada kawasan gambut kering di beberapa provinsi seperti Riau dan Kalimantan. Selain faktor alam, aktivitas kanalisasi baik untuk pembangunan infrastruktur, pembukaan perkebunan sawit dan sarana prasarana kebutuhan masyarakat memberikan dampak cukup signifikan pada kerentanan wilayah gambut untuk terbakar. Kondisi demikian turut pula disebabkan oleh adanya perilaku masyarakat yang tidak bijak seperti membuang puntung rokok

sembarangan serta menggunakan api sebagai instrument pembukaan lahan. Menyikapi masalah kebakaran hutan dan lahan, Pemerintah telah bergerak serius merumuskan regulasi pengaturan tata kelola ekosistem gambut maupun hutan. Satu diantara upaya serius dalam memperbaiki kondisi pasca kebakaran sekaligus mencegah terjadinya kebakaran dilakukan dengan membentuk Badan Restorasi Gambut melalui Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2016 yang saat ini berganti nama menjadi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove melalui Peraturan Presiden No. 120 tahun 2020. Tugas penting institusi tersebut berfokus untuk melakukan upaya restorasi gambut di 7 (tujuh) provinsi prioritas termasuk Riau melalui kerjasama lintas sektor berbasis masyarakat. Perlu diketahui dalam konteks ini bahwa Riau memiliki luas gambut sekitar 5,09 juta hektar (56,42% dari total luas gambut Sumatera) sehingga kondisi demikian menjadikan bumi melayu sebagai satu diantara fokus restorasi gambut oleh Pemerintah (Admin, 2021).

Pelaksanaan upaya restorasi dan pencegahan kebakaran hutan, dorongan terhadap partisipasi Pemerintah Daerah, masyarakat dan organisasi lokal menjadi poin utama. Ini merupakan isu bersama yang memerlukan komitmen pada level pemerintah daerah sebagai pembuat regulasi maupun masyarakat dan kelembagaan sebagai mitra serta sasaran utama program restorasi. Masyarakat Peduli Api atau di beberapa desa penyebutannya saat ini menjadi Masyarakat Peduli Bencana. Mereka termasuk satu garda terdepan di level desa yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk pencegahan kebakaran hutan

dan lahan. Adanya kelompok masyarakat tersebut memberikan manfaat pada diketahuinya sejak dini resiko kebakaran hutan dan lahan sehingga penanganannya lebih cepat. Manfaat inilah yang menjadikan setiap daerah di Riau termasuk di Desa Tanjung Leban, memiliki kelompok masyarakat serupa, yang bergerak seirama berdasarkan atas ketentuan surat keputusan berbadan hukum maupun inisiatif mandiri. Masyarakat Peduli Api yang selanjutnya disingkat (MPA), kemudian berganti penyebutan sekitar tahun 2019 menjadi Masyarakat Peduli Bencana (MPB) Desa Tanjung Leban memiliki anggota berjumlah 10 orang. Pada mulanya, saat masih disebut MPA, mereka bekerja tanpa digaji, seluruh keperluan ditanggung oleh pemerintah desa dan terkadang dari uang pribadi. Sistem penggajian atau insentif baru didapat sekitar tahun 2009 berupa pendanaan dari desa sebesar Rp.55.000.000,00 pertahun.

Dana yang diberikan desa itu mencakup untuk segala hal yang berkaitan dengan kegiatan MPB, seperti minyak bensin motor untuk kegiatan patroli rutin, perawatan mesin untuk memadamkan api, dan gaji untuk setiap anggota. Setelah adanya pendanaan dari desa dibuka pendaftaran bagi masyarakat yang ingin bergabung menjadi anggota MPB, untuk saat ini seluruh anggota MPB yang tercatat berjumlah 18 orang. Dengan dana sekitar Rp55.000.000,00 pertahun. Sesungguhnya, untuk rutinitas kerja setiap hari dengan segala keperluan lapangan, dana tersebut tidaklah optimal menutupi seluruh kebutuhan. Namun, pelibatan mereka dalam MPB tidak semata-mata dikarenakan insentif, ada hal lain

berupa panggilan hati untuk berkontribusi bagi keamanan, kesehatan, dan *zero fire* di tanah kelahiran. Di sisi lain, MPB tidak bekerja sendiri, mereka aktif menjalin kerjasama dengan ragam kelembagaan dari dalam dan luar Desa Tanjung Leban seperti Damkar, kepolisian, universitas, NGO, dan sebagainya untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan terkait pencegahan kebakaran. Partisipasi masyarakat dalam menjaga dan mengelola lahan gambut yang ada di Desa Tanjung Leban berjalan dengan baik melalui sejumlah kegiatan seperti patroli menemukan titik api kedalaman hutan. Patroli dilakukan setiap hari melalui menara pantau untuk melihat apakah ada asap dan indikasi kebakaran. Resiko terjadi kebakaran hutan dan lahan di Tanjung Leban cukup tinggi, sebab sekitar 90% lahan merupakan gambut yang sudah ditanaman kelapa sawit oleh masyarakat

MASALAH PENELITIAN

Berdasarkan Latar Belakang diatas peneliti mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aktivitas dan tantangan yang dihadapi oleh Masyarakat Peduli Bencana (MPB) Tanjung Leban dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan gambut?
2. Bagaimana modal sosial serta kohesi social yang dibangun oleh Masyarakat Peduli Bencana (MPB) Tanjung Leban dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan gambut?

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Modal Sosial Oleh Robert Putnam

Dalam mendukung penelitian ini, teori yang digunakan merupakan teori yang relevan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Teori yang digunakan adalah teori modal sosial dari Robert Putnam. Perhatian Putnam pada masalah modal sosial dipicu oleh keprihatinannya terhadap semakin menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (terjadi *public distrust*). Putnam juga menunjukkan hasil kajiannya bahwa bukan hanya partisipasi politik semakin melemah, tetapi juga keanggotaan pada organisasi-organisasi sukarela (*voluntary organizations*) semakin menurun. Tendensi demikian memperlihatkan kondisi politik yang tidak menguntungkan. Putnam menyebutnya sebagai gejala *uncivic generation*. Pandangan Putnam mengenai modal sosial sebenarnya memiliki beberapa kesamaan dengan pandangan Bourdieu dan Coleman (Tsounis et al., 2023). Putnam menunjukkan bahwa modal sosial melekat dalam relasi-relasi sosial. Modal sosial dibangun melalui jejaring sosial. Adapun komponen-komponen yang terendap dalam modal sosial tersebut menurut Putnam mencakup: (1) trust (kepercayaan) atau nilai-nilai positif yang menghargai perkembangan atau prestasi, (2) norma sosial dan obligasi, serta (3) jejaring sosial yang menjadi wadah kegiatan sosial, terutama dalam bentuk asosiasi-asosiasi sukarela (*voluntary associations*). Putnam percaya bahwa asosiasi

sukarela memiliki peran penting dalam upaya mengembangkan modal sosial. Asosiasi sukarela bukan hanya efektif menyalurkan informasi tetapi menjadi ajang berinteraksi dan melakukan transaksi di antara aktor-aktor yang terhimpun di dalamnya. Interaksi dan transaksi tersebut selanjutnya mendorong mereka mengembangkan norma-norma yang memfasilitasi kerja sama saling menguntungkan antara aktor-aktor tersebut (Matilda et al., 2021).

Dalam menguraikan masalah modal sosial Putnam lebih banyak mengadopsi pendekatan sosiologi fungsionalisme daripada pendekatan sosiologi konflik. Tendensi demikian terutama tampak pada cara Putnam membahas relasi-relasi kuasa antara negara dan masyarakat sipil. Putnam mengabaikan konflik internal yang terjadi baik dalam asosiasi sukarela, maupun konflik antar asosiasi sukarela.

Masyarakat Peduli Bencana (Mpb)

Desa Tanjung Leban memiliki luas wilayah yang mencapai 26.000 Ha yang mana sebagian besar dari luas wilayah desa merupakan lahan areal perkebunan sawit dengan jenis tanah yang ada di Desa Tanjung Leban merupakan tanah gambut. Menyadari akan rentannya Desa Tanjung Leban mengalami bencana alam berupa kebakaran hutan dan lahan dan efek dari kebakaran hutan dan lahan sangat berdampak pada aspek ekonomi, sosial, kesehatan, dan juga lingkungan, maka dibentuklah lembaga masyarakat yang secara khusus menangani dan menjadi garda terdepan dalam hal bencana kebakaran hutan dan lahan gambut di Desa Tanjung Leban. Lembaga ini

bernama Masyarakat Peduli Bencana (MPB). Masyarakat Peduli Bencana Desa Tanjung Leban dibentuk pada tahun 2006 sejak Desa Tanjung Leban memisahkan diri dari Desa Sepahat, bersamaan dengan pembentukan Desa Tanjung Leban dan terpilihnya Bapak Mahadar menjadi kepala desa pertama Desa Tanjung Leban. Pada masa kepemimpinan beliau lah lembaga-lembaga desa di bentuk dan dikembangkan termasuk Masyarakat Peduli Bencana (MPB) yang secara khusus diperintahkan untuk menangani masalah kebakaran hutan dan lahan gambut

Masyarakat Peduli Api diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana (Sayendri, 2016). Masyarakat Peduli Bencana (MPB) Tanjung Leban pada awal pembentukan hanya terdiri dari 10 orang dan masih bernama regu pemadam, awal mula pembentukan lembaga ini didasari atas inisiatif masyarakat dan pemerintahan desa atas dasar kecintaan, kepedulian, serta niat tulus untuk menjaga alam dan lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan gambut yang sering terjadi dan merupakan bencana tahunan terutama saat masuk musim kemarau di Desa Tanjung Leban menjadi salah satu alasan kenapa lembaga ini dibentuk guna menjaga, merawat dan mampu menjadi garda terdepan dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut yang terjadi di Desa Tanjung Leban, karena MPB terbentuk atas dasar kepedulian, kecintaan, dan merupakan suatu bentuk kesadaran diri dari masyarakat Desa Tanjung Leban akan pentingnya menjaga dan merawat hutan maka MPB Desa Tanjung Leban melaksanakan

kegiatan dengan senang hati dan tanpa mengharapkan imbalan atau bayaran, semua ini didasari karena kesadaran para anggota akan pentingnya menjaga hutan dan alam di desa mereka dan mereka sadar akan pentingnya hutan bagi kehidupan masyarakat Desa Tanjung Leban yang mana masyarakat Desa Tanjung Leban umumnya berprofesi sebagai petani sawit.

Struktur Keanggotaan Masyarakat Peduli Bencana

Dalam lembaga MPB Desa Tanjung Leban yang beranggotakan 18 orang, memiliki struktur kepemimpinan yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, koordinator lapangan, ketua regu satu dan regu dua yang mana setiap anggota yang diberikan amanah dalam struktur keanggotaan memiliki peran dan fungsinya masing-masing untuk dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan memegang teguh rasa kepercayaan dari setiap anggota. ketua berperan sebagai penanggung jawab dan pemberi keputusan dalam lembaga MPB, sekretaris bertanggung jawab terhadap absensi anggota selama bertugas dan bertanggung jawab atas surat menyurat yang mungkin dibutuhkan, bendahara bertanggung jawab terhadap keuangan, ketua regu pemadam bertanggungjawab untuk memimpin dan memerintahkan anggota-anggotanya dalam melakukan pemadaman titik api apabila ditemukan, regu pemadam api dibagi menjadi dua tim dan setiap tim berjumlah delapan orang.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilakukan di

Desa Tanjung Leban, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis. Obyek dari penelitian ini adalah modal sosial masyarakat peduli bencana (mpb) dalam pencegahan kebakaran lahan gambut. Adapun kriteria yang dipilih peneliti adalah (1) kepala desa yang dianggap mengerti dengan perkembangan mpb. (2) anggota yang sudah lama bergabung dengan mpb (3) anggota yang baru bergabung dengan mpb (4) masyarakat yang kebunnya pernah terbakar.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh peneliti kepada informan guna memperoleh data yang dapat menjawab permasalahan penelitian. Dalam wawancara penulis menggunakan bahasa yang mudah dimengerti sehingga informan dapat mengerti percakapan yang sedang dilakukan dan dapat memberikan kesan yang baik saat berlangsungnya wawancara. Wawancara merupakan mengumpulkan data secara langsung untuk mendapatkan data tambahan, (Suyanto, 2010). Wawancara dalam penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi secara langsung dan mendalam untuk mengetahui dan unsur-unsur dari modal sosial yang dibangun dan tetap dipertahankan oleh Masyarakat Peduli Bencana (MPB) contoh: wawancara mengenai hubungan MPB dengan individu dan lembaga lain diluar MPB.

Dokumentasi

Merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen biasa berbentuk tulisan, gambar, video, ataupun audio. hasil penelitian dari

observasi dan wawancara akan lebih kredibel apabila didukung dengan adanya dokumentasi. Dokumentasi yang ada pada peneliti adalah berupa gambar, surat, catatan harian, laporan. Merupakan metode yang dilakukan untuk meningkatkan ketepatan pengamatan.

Observasi

Observasi dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap lembaga MPB Desa Tanjung Leban yang meliputi pengamatan terhadap aktivitas dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh lembaga MPB dalam upaya pencegahan kebakaran yaitu melakukan patroli rutin menemukan titik api, dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang urgensi pentingnya menjaga hutan dan lahan gambut. Aktivitas melakukan pemadaman api sedini mungkin dan kegiatan MPB dalam upaya restorasi lahan gambut yang terdegradasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebakaran hutan dan lahan gambut menjadi isu penting yang masuk dalam konsentrasi program kerja dan menjadi salah satu tanggung jawab Masyarakat Peduli Bencana (MPB). Dalam konteks mengerjakan tugas dan fungsi sesuai dasar pembentukan, Masyarakat Peduli Bencana telah melakukan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan gambut dengan berbasis pada kolektif internal kelompok serta kerjasama kemitraan. Dengan perubahan nama lembaga dari MPA menjadi MPB seperti pada saat ini otomatis membuat tugas dan fungsi dari lembaga ini menjadi bertambah dan tidak hanya terfokus pada kebakaran lahan gambut saja namun tetapi juga pada bencana-bencana yang mungkin terjadi di Desa

Tanjung Leban seperti abrasi pada pinggir pantai yang ada di Desa Tanjung Leban.

Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut Patroli Rutin Menemukan Titik Api

MPB melakukan patroli rutin kedalam hutan guna menemukan titik api dan dapat melakukan upaya pencegahan dini berupa pemadaman jika ditemukan titik api yang berpotensi membesar dan dapat menyebar ke areal lain. Patroli rutin menemukan titik api ini menjadi salah satu upaya MPB dalam menjaga dan melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan gambut. Program rutin MPB yaitu patroli titik api kedalam hutan dilakukan setiap hari secara bergantian oleh setiap anggota MPB yang bertugas, dalam menjalankan program ini para anggota dibagi menjadi beberapa kelompok yang mana dalam satu hari anggota yang bertugas untuk melakukan patroli berjumlah dua sampai tiga orang, para anggota yang bertugas menyisir ke dalam hutan yang berpotensi terjadi kebakaran dengan menggunakan sepeda motor mereka masing masing, sebelum menyisir ke dalam hutan yang jaraknya bisa sampai lebih dari 10 km anggota MPB yang akan melakukan patroli ke dalam hutan terlebih dahulu melakukan musyawarah dan berkoordinasi dengan anggota-anggota MPB yang lain untuk menentukan rute patroli.

Sosialisasi dan Edukasi Kepada Masyarakat

Masyarakat Peduli Bencana (MPB) Desa Tanjung Leban selain aktif dalam kegiatan patroli menemukan titik api ke dalam hutan juga sering melakukan kegiatan

sosialisasi dan edukasi kepada warga masyarakat tentang urgensi keterlibatan mereka dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan gambut dan bencana bencana alam lain yang mungkin dapat terjadi di Desa Tanjung Leban seperti abrasi. masyarakat Desa Tanjung Leban sudah banyak yang sadar dan mengerti akan pentingnya menjaga hutan dan lahan gambut, seperti sudah banyak warga masyarakat yang mengikuti aturan dan larangan dari MPB untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar (memerun) karena membuka lahan dengan cara membakar sangat berpotensi besar menyebabkan kebakaran hutan dan lahan gambut hal ini tidak terlepas dari gencarnya anggota MPB dalam melakukan kegiatan sosialisasi.

Tindakan Pemadaman

Kebakaran yang terjadi pada tanah gambut sangat sulit untuk dipadamkan para anggota yang bertugas memadamkan api bekerja siang malam agar api dapat dipadamkan dengan cepat dan tidak meluas ke daerah lain. Dalam upaya pemadaman api yang terjadi di lahan gambut sangat susah dilakukan hal ini karena karakteristik dari tanah gambut itu sendiri yang memang sangat mudah terbakar dan ketika sudah terbakar api yang berada pada tanah gambut akan dengan mudah menyebar.

Ketika kebakaran sudah terlanjur menyebar dan menjalar ke lahan atau lokasi lain seluruh anggota mpb akan langsung turun dengan membawa mesin penyedot air untuk memadamkan api sesegera mungkin

Restorasi Lahan Gambut

Restorasi lahan gambut

merupakan suatu upaya untuk menjaga dan melestarikan lahan gambut dalam hal ini restorasi berperan sebagai upaya pemulihan ekosistem gambut yang sudah terdegradasi agar struktur, kondisi hidrologis dan fungsi dari lahan gambut berada pada kondisi pulih kembali. Dalam upaya restorasi lahan gambut yang dilakukan oleh MPB Desa Tanjung Leban terdapat beberapa langkah yaitu, penanaman kembali (*revegetation*), pembasahan kembali (*rewetting*),

Penanaman Kembali (*Revegetation*)

upaya penanaman kembali lahan gambut yang rusak akibat terbakar di Desa Tanjung Leban Masyarakat Peduli Bencana (MPB) menggandeng serta masyarakat dalam menjalankan kegiatan, penanaman kembali lahan yang terdegradasi dilakukan dengan menanam tanaman asli ekosistem gambut seperti Jelutung, Bintangur, Meranti Bakau secara gotong-royong. Dalam pelaksanaan kegiatan penanaman kembali lahan bekas areal terbakar para anggota MPB dibantu oleh masyarakat dalam pengerjaan kegiatan, anggota MPB bersama masyarakat bekerja saling tolong menolong dalam kegiatan penanaman ini, kegiatan ini dimaksudkan agar lahan bekas terbakar tadi dapat digunakan seperti semula dan mencegah kebakaran kembali terulang di areal tersebut. Kegiatan penanaman ini penting untuk dilakukan agar lahan gambut dapat terjaga dan tidak rusak.

Pembasahan Lahan Gambut (*Rewetting*)

Pembasahan lahan gambut (*rewetting*) merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menjaga kelembaban

tanah gambut, tanah gambut bisa dikatakan mengalami kekeringan ketika kadar air pada permukaan lahan gambut sangat rendah kekeringan pada lahan gambut dapat menjadi pemicu terjadinya kebakaran, salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam menjaga kelembaban lahan gambut adalah dengan cara melakukan pembasahan, pembasahan pada lahan gambut MPB dalam upaya pembasahan lahan gambut melakukan kegiatan pembuatan sekat kanal yang berfungsi mengairi tanah gambut dan membuat lahan gambut tetap lembab pada musim kemarau. sekat kanal yang merupakan salah satu program kerja dari lembaga MPB dikerjakan secara bersama-sama, dalam proses pembuatan sekat kanal anggota MPB menerapkan nilai gotong royong di dalamnya yang mana dengan adanya sikap gotong royong yang diterapkan dan melakukan pekerjaan secara bersama-sama maka akan memudahkan pengerjaan suatu kegiatan dalam hal ini adalah pembuatan sekat kanal. Sekat kanal pada tanah gambut sangat diperlukan sebagai salah satu upaya untuk menjaga kelembaban tanah gambut terutama ketika tiba musim kemarau.

Tantangan Masyarakat Peduli Bencana (MPB) dalam Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut

Faktor Internal

Masyarakat Peduli Bencana sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan gambut tentunya memiliki tugas dan fungsi yang cukup berat dan memerlukan tanggung jawab yang besar pula, permasalahan yang dialami oleh anggota MPB selama bertugas dapat berasal dari dalam

maupun luar kelompok. Permasalahan yang dihadapi oleh anggota MPB yang berasal dari dalam diri kelompok seperti semakin berkurangnya rasa solidaritas antar sesama anggota, terjadinya beberapa perselisihan antar beberapa anggota didalam lembaga MPB yang dapat berakibat pada rusaknya komunikasi antar anggota. Komunikasi menjadi suatu hal yang penting bagi setiap anggota terutama pada saat melakukan pemadaman.

Faktor Eksternal

Dalam menjalankan kegiatan dan melakukan upaya pencegahan, pemadaman, dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan, lembaga MPB membutuhkan dukungan berupa pendanaan dari pemerintah untuk melaksanakan perannya ditingkat masyarakat. Lembaga MPB sebagai lembaga sukarela yang memiliki tugas membantu Kesatuan Pengelolaan Hutan atau Unit Pelaksana Teknis dalam upaya pencegahan, pemadaman, serta penanganan pasca kebakaran tentunya membutuhkan bantuan materil berupa pendanaan untuk setiap kegiatan yang dijalankan oleh anggota MPB hal ini karena anggota MPB tidak memiliki pendanaan mandiri dalam kelembagaannya. Sebagai lembaga yang bersifat swadaya, MPB dalam hal menjalankan tugas dan fungsi tidak dapat berjalan dengan sempurna karena sangat dibutuhkannya bantuan dari pihak kedua (pemerintah) untuk menjalankan setiap kegiatan. Pendanaan yang kurang kepada MPB sedikit banyak berpengaruh terhadap kegiatan MPB dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di desa. Lembaga

MPB membutuhkan pendanaan baik dalam tugas pencegahan, pemadaman, serta penanganan pasca kebakaran.

Modal Sosial Masyarakat Peduli Bencana (Mpb)

Modal sosial dapat disimpulkan sebagai investasi seseorang atau kelompok dalam kehidupan bermasyarakat agar tetap dapat eksis hal ini terdiri dari solidaritas, kepercayaan, jaringan sosial serta norma dalam menjalin hubungan kerjasama agar terwujudnya tujuan individual maupun kelompok secara efektif dan efisien.

Kepercayaan (*trust*)

Kepercayaan dapat muncul melalui hubungan yang selalu dijaga dengan baik dan harus tetap dirawat dengan benar agar terciptanya hubungan yang sama-sama menguntungkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Rasa kepercayaan dalam lembaga MPB muncul karena setiap anggota yang tergabung disatukan oleh tujuan yang sama yaitu untuk menjaga dan merawat hutan desa mereka dari bencana kebakaran hutan dan lahan. Dalam lembaga MPB setiap anggota juga telah menanamkan rasa kekeluargaan sehingga setiap pekerjaan yang mereka lakukan akan terasa lebih ringan, tidak adanya tekanan, dan saling membantu. Dengan adanya rasa kepercayaan dalam setiap anggota kelompok maka akan memberikan dampak yang positif dan akan memberikan rasa semangat bagi setiap anggota kelompok dalam menjalankan setiap kegiatannya.

Jaringan (*network*)

Jaringan sosial didefinisikan sebagai pola dalam arti hubungan

sosial yang dimiliki oleh individu atau kelompok yang memiliki keteraturan untuk perilaku mereka dalam pengaturan komunitas. Jaringan sosial adalah model hubungan sosial kolektif di mana individu dan kelompok ada dalam berbagai bentuk. Jejaring modal sosial sangat penting untuk menjalin kerjasama dalam kelompok atau organisasi sosial. Kolaborasi terjalin karena interaksi yang terjadi antara satu sama lain. Melalui interaksi ini, sebuah jaringan terbentuk. Jaringan sosial menyediakan hubungan karena melibatkan orang-orang yang bekerja sama untuk mendapatkan hasil yang saling menguntungkan. Oleh karena itu, semakin besar jumlah dan ukuran jaringan yang terbentuk, semakin besar peluang bagi seseorang untuk memanfaatkan modal jaringan sosial, dan jaringan tersebut membantu menyediakan informasi bagi semua orang. Jaringan yang ada pada lembaga MPB merupakan suatu hal yang berperan penting dalam perkembangan dan kemajuan lembaga MPB agar menjadi lebih baik. Interaksi-interaksi dan hubungan yang terbentuk karena adanya jaringan akan memudahkan anggota-anggota MPB untuk menjalankan tugas dan fungsi dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan gambut di Desa Tanjung Leban. Kerjasama yang dilakukan biasanya berupa bantuan dalam memadamkan api oleh regu pemadam dari PT. BBHA, para anggota yang tergabung di regu pemadam PT. BBHA selalu sigap dan cepat membantu para anggota MPB ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan di desa, dengan bantuan yang diberikan oleh anggota regu

pemadam maka api pun cepat dipadamkan dan tidak sampai membesar dan membakar kebun lebih luas hal ini karena regu pemadam dari PT. BBHA memiliki peralatan untuk memadamkan api yang lengkap dan mereka menggunakan pakaian *safety* yang lengkap pula sehingga para anggota regu pemadam dapat menjangkau api lebih dalam tanpa mengalami luka, hal semacam ini yang sebenarnya dibutuhkan oleh anggota MPB Desa Tanjung Leban, namun mereka hanya memiliki peralatan seadanya. Hal ini lah yang menjadi dasar mengapa MPB sangat menjaga hubungan dengan lembaga atau pihak luar.

Norma (*norms*)

Nilai dan norma merupakan suatu hal yang penting dan sangat berguna bagi anggota kelompok maupun individu disekitarnya, nilai merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari norma. Dalam kehidupan bermasyarakat, untuk menghindari perselisihan dan konflik, biasanya ada aturan untuk mengatur lingkungan. Dengan norma-norma yang berlaku pada lingkungan, setiap individu menjadi sadar akan keterbatasan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Berbagai norma diterapkan dan tertanam dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Norma yang ada seringkali dapat berupa aturan tertulis atau tidak tertulis yang diikuti oleh masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang harmonis. Norma juga sering disebut sebagai aturan yang berlaku untuk mengatur setiap tingkah laku manusia. MPB Desa Tanjung Leban menerapkan peraturan-peraturan yang ditujukan kepada seluruh masyarakat Desa Tanjung Leban

dalam hal pemanfaatan dan penanganan hutan dan lahan gambut yang ada di desa.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Modal Sosial Masyarakat Peduli Bencana dalam Pencegahan Kebakaran Gambut di Desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Aktivitas MPB berupa pencegahan kebakaran hutan dan lahan gambut dengan melakukan kegiatan patroli secara rutin setiap hari dan juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya menjaga hutan dan lahan serta bahaya dan dampak melakukan pembakaran hutan. Pemadaman api di lahan yang sudah terbakar dilakukan dengan cepat dan sesegera mungkin sehingga api tidak sempat menyebar ke tempat lain. Restorasi lahan gambut dengan cara melakukan penanaman kembali (*revegetation*) dan pembasahan lahan gambut (*rewetting*).
2. Unsur-unsur modal sosial yaitu kepercayaan (*trust*), jaringan (*network*), dan norma dalam bentuk nyatanya pada lembaga MPB adalah dengan menumbuhkan rasa saling percaya antar setiap anggota kelompok dan juga dengan individu dan kelompok lain, membangun relasi secara luas dan baik dengan individu maupun

kelompok lain, serta dengan memberikan aturan-aturan yang mengikat untuk setiap anggota kelompok.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang peneliti uraikan di atas, maka peneliti memberikan saran sehubungan dengan hasil penelitian modal sosial masyarakat peduli bencana (MPB) dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan gambut, adapun saran yang dapat diberikan sebagai berikut: (1) Kebakaran hutan dan lahan gambut yang hampir setiap tahun terjadi di Desa Tanjung Leban sudah seharusnya menjadi fokus penanganan dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan gambut, upaya pencegahan kebakaran hutan menjadi penting untuk selalu dipatuhi dan diterapkan oleh seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintahan desa, lembaga-lembaga, sampai masyarakat yang berada di Desa Tanjung Leban. Lembaga MPB sebagai garda terdepan dalam penanggulangan bencana kebakaran yang selalu bekerja dalam pencegahan kebakaran hutan (2) Modal sosial yang ada pada Masyarakat Peduli Bencana (MPB) untuk lebih diperkuatkan dan selalu dipertahankan untuk kedepannya, sebab dalam hal ini untuk menimbulkan dan membangun suatu modal social yang baik antara MPB dengan berbagai pihak tentu memerlukan waktu yang cukup lama. Begitupun dengan kepercayaan yang sudah terjalin terutama dengan pemerintahan desa dan PT.BBHA.

DAFTAR PUSTAKA

Sidiq, R. S. S., Prawira, R. Y. (2019). *Environmental Protection To Mitigate The*

- Annual Forest And Land Fires Crisis In Riau Province Indonesia.*
<http://www.ijosea.isha.or.id/index.php/ijosea/article/view/37>
- Admin. (2021). *Rapat Koordinasi TIM Restorasi Gambut Daerah Provinsi Riau Tahun 2018.* Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau.
- Baskoro, B. C., Syarif, A. R., & Kosar, M. (2015). *Press Release Kebakaran Hutan dan Lahan: Bukan Bencana Alam, Awal Bencana Ekologi.*
- Matilda, R., Siregar, H., & Naim, M. (2021). Modal Sosial sebagai Kekuatan Lembaga dalam Meningkatkan Kerjasama Berwirausaha. *E-Plus: Eksistensi Pendidikan Luar Sekolah Universitas Sultan Agung Tirtayasa*, 6(1), 40–49.
- Tsounis, A., Xanthopoulou, D., Demerouti, E., Kafetsios, K., & Tsaousis, I. (2023). Workplace Social Capital: Redefining and Measuring the Construct. *Soc Indic Res*, 165, 555–583.